

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap pemerintah daerah di Indonesia saat ini dituntut untuk mempunyai suatu kemampuan terkait dengan sumber daya yang dimiliki serta dapat mengelola dan menggali potensi-potensi yang ada dan juga dapat dijadikan sebagai suatu hal yang bermanfaat serta dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kemandirian fiskal pada tiap pemerintah daerah di Indonesia. Kebijakan desentralisasi yang dianut oleh Pemerintah Indonesia juga menjadikan setiap pemerintah daerah di Indonesia memiliki perwujudan terkait dengan otonomi daerah dan tetap berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah, sebagai perubahan dari undang-undang nomor 32 tahun 2004, dan juga sebagai upaya dalam menjaga kestabilan otonomi daerah dalam mewujudkan suatu desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal mempunyai arti bahwa tiap daerah menjadi mandiri dalam pengelolaan keuangannya, hal ini ditandai dengan semakin kuatnya kapasitas fiskal suatu daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD), serta diimbangi oleh dukungan perimbangan keuangan pusat dan daerah, antara lain dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK) (Ariansyah, Amir, Achmad, 2014). Setiap daerah yang masih kekurangan dana diberi bantuan oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Serta didukung oleh tujuan pelaksanaan otonomi daerah dengan mewujudkan desentralisasi fiskal yang kuat bagi tiap daerah, lalu dapat menciptakan suatu kemandirian daerah (Sularso & Restianto, 2011).

Proses otonomi daerah bergantung pada ketersediaan dana yang ada, semakin banyak dana yang tersedia maka semakin tercapai proses otonomi daerah tersebut (Saragih, 2003). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung (Mardiasmo, 2002).

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal tersebut juga sebagai wujud meskipun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam prakteknya, pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa Barat dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah utamanya di Jawa Barat dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh pada daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (Ariansyah, Amir, & Achmad, 2014).

Berikut akan disajikan mengenai persentase pendapatan asli daerah terhadap dana perimbangan pada Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan PAD tertinggi di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta (databoks.katadata.co.id) guna menilai kemandirian fiskal daerah yang bersangkutan.

Tabel 1.1
Perbandingan Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah

Provinsi	Jawa Barat		Jawa Tengah	
	PAD	%	PAD	%
2012	7.937.800	-	4.876.387	-
2013	10.201.312	22%	6.090.833	20%
2014	14.078.741	28%	8.848.395	31%
2015	16.158.348	13%	9.793.617	10%
2016	17.617.221	8%	10.645.141	8%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah)

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki persentase yang serupa meskipun dari angka atau nominal PAD yang dihasilkan berbeda, dari tahun 2013 menuju tahun 2014 PAD mengalami tren peningkatan namun persentasenya terus menurun pada tahun-tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD yang diperoleh oleh kedua provinsi meskipun menunjukkan tren

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peningkatan namun tidak signifikan seiring dengan dana perimbangan yang diperoleh, sehingga akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan (Fattah & Irman, 2012).

Seperti yang dilansir dari jabarprov.go.id situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa di akhir tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di Jawa Barat melampaui laju pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu mencapai 5,76% dengan capaian Nasional yang hanya mencapai 5,02%. Ahmad Heryawan pun selaku Gubernur Jawa Barat kembali merinci, kenaikan LPE ini paling tinggi di Pulau Jawa, dibandingkan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Provinsi DKI Jakarta. Maka dari pernyataan tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan kewenangan daerah berdasarkan data yang telah diperoleh khususnya pada Provinsi Jawa Barat dan keterkaitannya dengan ketergantungan fiskal.

Ketergantungan fiskal suatu daerah terjadi apabila otonomi daerah dilaksanakan tidak sesuai dengan ketersediaan dana yang memadai. Semakin banyak dana yang tersedia maka semakin tercapai proses otonomi tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan pada penelitian Ariansyah, Amir, dan Achmad (2014) bahwa di Kota Jambi jumlah penduduknya tergolong tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain, hal tersebut mencerminkan tingkat kebutuhan fiskal yang tinggi karena diperlukan fasilitas-fasilitas umum yang lebih banyak dibandingkan daerah kabupaten/kota lain. Berdasarkan hasil perhitungan hubungan antara tingkat ketergantungan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di kota Jambi sangat lemah, hal tersebut terindikasi dari hasil koefisien korelasi hanya sebesar 0,068. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Jambi tidak dapat mengurangi tingkat ketergantungan fiskal di kota Jambi dan besarnya pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan PAD di kota Jambi.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sanusi Fattah dan Irman (2012) menyatakan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan pada tahun 2001-2008 masih sangat kurang yaitu sekitar 6,78% sampai 8,62%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah di Sulawesi

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Selatan terhadap pemerintah pusat pada era otonomi daerah masih sangat tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wibowo (2007) menunjukkan adanya kecenderungan yang sama dalam komposisi APBD, dimana DAU adalah penerimaan terbesar. Besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah, tetapi proporsi PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transfer pemerintah berupa DAU cenderung dominan dalam membiayai belanja daerah.

Salah satu ciri utama daerah mampu melaksanakan suatu otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan PAD bisa menjadi kontribusi terbaik dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Fattah & Irman, 2012).

Dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat permasalahan yang muncul, yaitu transfer pemerintah pusat menjadi jalan utama oleh pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Saat transfer DAU yang diperoleh dari pemerintah pusat meningkat, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya DAU yang diperoleh tetap meningkat (Adi & Ekaristi, 2009).

Berikut ini akan disajikan mengenai perbandingan antara PAD terhadap dana perimbangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.2
Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

TAH UN	DANA PERIMBANGAN						TOTAL	%	PAD	%
	DBH	%	DAU	%	DAK	%				
2012	4.240.895	-	24.304.467	-	1.924.630	-	30.469.992	-	7.937.800	-
2013	3.450.540	-22,9	27.124.440	10,4	1.986.537	3,1	32.561.516	6,4	10.201.312	22,2

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2014	3.571.565	3,4	29.565.459	8,3	2.028.169	2,1	35.165.193	7,4	14.078.741	27,5
2015	2.911.264	-22,7	30.559.260	3,3	2.870.440	29, 3	36.340.964	3,2	16.158.348	12,9
2016	3.886.114	25,1	31.820.000	4,0	8.849.251	67, 6	44.555.365	18,4	17.617.221	8,3
RATA-RATA PERSENTASE									8,9	17,7

(dalam jutaan rupiah)

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1.2, dapat dilihat dari tahun ke tahun selama periode 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan dana perimbangan ke provinsi Jawa Barat yang cukup besar nominal penganggarnya. Pada tahun 2012, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebesar 30,47 trilyun rupiah. Sampai pada tahun 2016, terlihat bahwa dana perimbangan yang diterima provinsi Jawa Barat membengkak hingga mencapai 44,55 trilyun rupiah, atau terdapat kenaikan persentase sebesar 18,4% dari tahun 2015. Bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dengan total persentase sebesar 17,7%, sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada provinsi sebagai dana bantuan (*grant*) meskipun apabila kita kaitkan dengan total persentase dana perimbangan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sebesar 8,9%.

Tingginya tingkat ketergantungan belanja daerah terhadap pendanaan dana perimbangan, menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Seharusnya pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber dana tersebut untuk sektor-sektor lebih produktif sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah dan dapat meningkatkan respon pemerintah pada masyarakat serta meningkatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengalokasikan sumber dana dengan baik (Adi & Ekaristi, 2009). Sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pada Provinsi Jawa Barat.

Berikut akan disajikan mengenai persentase dana perimbangan serta belanja daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.

Tabel 1.3
Persentase Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016
(dalam jutaan rupiah)

TAHUN	DANA PERIMBANGAN	BELANJA	PERSENTASE
2012	30.469.992	45.951.941	66%
2013	32.561.516	54.743.633	59%
2014	35.165.193	60.930.772	58%
2015	36.340.964	69.894.665	52%
2016	44.555.365	78.727.976	57%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dikaji bahwa terjadi fluktuasi rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah provinsi dengan kecenderungan pada tren yang meningkat (meskipun dalam persentase menurun). Melihat data bahwa sebagian besar daerah memiliki rasio antara 52-66 persen terhadap belanja daerahnya, hal ini berarti belanja daerah Provinsi dibiayai oleh 52-66 persen dari dana dana perimbangan. Berdasarkan pada hal tersebut, sangat jelas terlihat bahwa daerah masih mengalami ketergantungan secara keuangan yang cukup signifikan pada pemerintah pusat.

Signifikannya ketergantungan keuangan daerah terhadap pusat, sekaligus menjadi tekanan dalam pengumpulan PAD di provinsi. Optimalnya, dana perimbangan yang diperoleh daerah dialokasikan untuk belanja daerah yang kemudian akan meningkatkan PAD. Realitas menunjukkan hal yang sebaliknya, daerah cenderung mengabaikan penggalan PAD sebagai basis utama penerimaan daerah dengan menjadikan dana perimbangan sebagai substitusinya (Rusydi, 2015).

Tabel 1.4
Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016
(dalam jutaan rupiah)

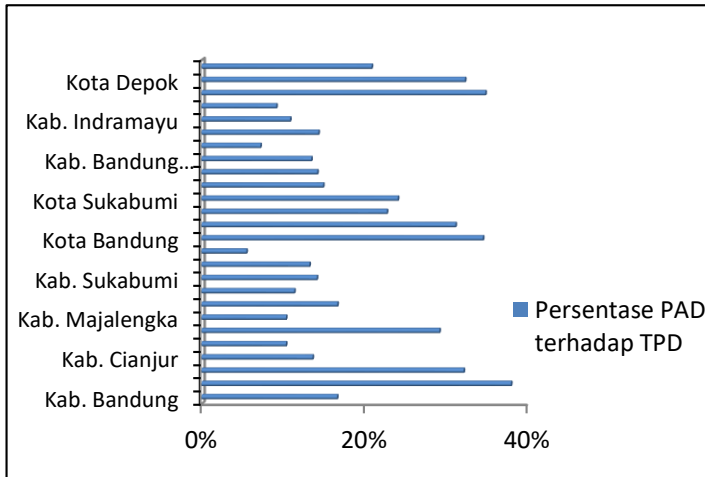
TAHUN	BELANJA	PERSENTASE
-------	---------	------------

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2012	45.951.941	-
2013	54.743.633	19%
2014	60.930.772	11%



2015	69.894.665	15%
2016	78.727.976	13%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah)

Perkembangan belanja daerah provinsi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan secara nominal, tetapi dengan persentase yang menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2012 belanja daerah sebesar 45,95 triliun rupiah kemudian menjadi 54,74 triliun rupiah pada tahun 2013, meningkat sebesar 19 persen. Sayangnya pada tahun-tahun berikutnya pengeluaran mengalami trend yang fluktuatif walaupun jumlah nominalnya meningkat.

Selanjutnya akan disajikan mengenai persentase Total Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai dengan 2016.

Gambar 1.1

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**Persentase Total Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016
(dalam juta rupiah)**

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa seluruh daerah di Jawa Barat pada tahun 2012-2016, rata-rata kemampuan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) tidak termasuk ke dalam kategori baik. Baiknya kemampuan kemandirian keuangan suatu daerah rasionya berkisar antara 40,01% - 50,00% (Ariansyah, Amir, Achmad, 2014). Dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, rata-rata PAD hanya menyumbangkan sekitar 19% dari total penerimaan daerah. Dimana kabupaten Tasikmalaya menyumbangkan persentase PAD terendah dengan 7%, dan kabupaten Bekasi dengan persentase PAD terbesar dengan 38%.

Kabupaten Tasikmalaya menyumbangkan PAD terendah di Jawa Barat, meskipun kedua daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah terkait dengan pertanian juga pariwisata, namun hal tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal karena pengelolaan tempat wisata yang belum maksimal dan sarana prasarana serta infrastruktur yang belum dibangun. Lain halnya dengan kabupaten Bekasi yang memiliki presentase PAD terbesar terhadap Total Pendapatan Daerahnya. Hal tersebut disebabkan karena kabupaten Bekasi mengalami peningkatan PAD sebesar Rp193,33 miliar, dari alokasi semula sebesar Rp1,62 triliun menjadi Rp1,82 triliun.

PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah yang bertambah sebesar Rp147,76 miliar lebih yang berasal dari BPHTB, PBB, pajak penerangan jalan, pajak restoran, dan pajak parkir. Artinya, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pemerintah daerah Jawa Barat didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat sekitar 81% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin dan tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Dimana selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat, dan juga belum maksimalnya pengelolaan terhadap infrastruktur yang ada pada daerah yang bersangkutan (Sularso & Restianto, 2011).

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu

Selanjutnya dari segi kapasitas fiskal, pada pasal 1 butir 2 PMK No. 226/PMK.07/2012 juga dituliskan bahwa kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan pemerintahan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintah setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Adapun peta kapasitas fiskal pada kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2016 diukur menggunakan Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), IKF suatu provinsi diperoleh dengan membagi kapasitas fiskal provinsi yang bersangkutan dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh provinsi di Indonesia. Dengan cara perhitungan yang serupa, IKF suatu kabupaten/kota diukur dengan membagi kapasitas fiskal kabupaten/kota tertentu dengan rata-rata kapasitas fiskal semua kabupaten/kota di Indonesia.

Di dalam pasal 4 ayat (6) PMK No. 226/PMK.07/2012 disebutkan bahwa berdasarkan perhitungan IKF, maka daerah dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) kategori, yaitu daerah yang IKF-nya lebih atau sama dengan 2 ($IKF = 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi; daerah yang IKF-nya lebih atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ($1 = IKF < 2$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Tinggi; daerah yang IKF-nya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ($0,5 < IKF < 1$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang; dan daerah yang IKF-nya kurang dari atau sama dengan 0,5 ($IKF = 0,5$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Rendah.

Berikut merupakan Indeks Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2016.

Tabel 1.5
Indeks Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota
Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

No.	Tahun	IKF	Kategori
1.	2012	0,30	Rendah
2.	2013	0,31	Rendah

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.	2014	0,31	Rendah
4.	2015	0,27	Rendah
5.	2016	0,30	Rendah

Sumber: jdih.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) kabupaten/kota di Jawa Barat, dapat dijelaskan bahwa rata-rata perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012-2016 menunjukkan angka 0,30 dimana apabila kita kaitkan kepada kategori IKF angka tersebut termasuk dalam kategori rendah.

Selanjutnya Alderete (Dollery & Worthington, 1996) mengatakan bahwa ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer kepada daerah untuk meningkatkan belanja daerah, muncul spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer itu secara asimetris, perilaku asimetris ini dapat dilihat dengan adanya pengeluaran yang berasal dari bantuan yang memberikan keuntungan pada institusi tertentu, sedangkan di lain pihak anggaran juga berkurang. Fenomena ini oleh Dollery dan Worthington diindikasikan sebagai ilusi fiskal.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dude, Kumenaung, & Rotinsulu, 2014) yang menunjukkan terjadi ilusi fiskal setelah diberlakukannya otonomi daerah. Karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah, dengan nilai yang signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Adi & Ekaristi, 2009) tentang deteksi ilusi fiskal di Jawa Tengah pada tahun 2001 s/d 2004. Penelitian tersebut menemukan adanya fenomena ilusi fiskal pada kinerja keuangan daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Terdapatnya fenomena ilusi fiskal dalam kinerja keuangan anggaran pemerintah daerah disebabkan karena tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat. Besarnya rasio dana perimbangan terhadap belanja daerah dibandingkan dengan rasio PAD terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung pada dana transfer tersebut. Tidak efisiennya penggunaan dana transfer dalam alokasinya terhadap belanja daerah untuk belanja infrastruktur menjadikan daerah tidak memiliki sumber penerimaan.

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Mueller dalam (Adi & Ekaristi, 2009) mendefinisikan ilusi fiskal bahwa pemerintah akan melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan sedemikian rupa, sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada persepsi/penilaian maupun pada tindakan/perilaku tertentu. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan rekayasa terhadap anggaran agar mampu mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam hal membayar pajak ataupun retribusi, dan juga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana perimbangan khususnya DAU dalam jumlah yang lebih besar.

Berdasarkan fenomena yang sudah diuraikan dan terdapat penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi hasil, maka perlu dilakukan sebuah penelitian untuk membuktikan determinannya ketergantungan fiskal pemerintah daerah dan deteksi ilusi fiskal pada Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memuat judul **“Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah dalam Kerangka Ilusi Fiskal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, diduga terjadi perilaku asimetris pemerintah daerah dalam merespon dana perimbangan pemerintah pusat. Perilaku asimetris pemerintah daerah dapat mempengaruhi pola belanja daerah dan pengumpulan pendapatan daerah dalam kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah untuk penelitian pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja daerah dalam kerangka ilusi fiskal ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah?
2. Apakah dana bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah?
3. Apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah?
4. Apakah terdapat ilusi fiskal dalam struktur APBD pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016?

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi fenomena ilusi fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota pada provinsi Jawa Barat tahun 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan pada penelitian ini dapat memberikan sebuah pembuktian terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu ilmu atau pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam keuangan pemerintahan. Baik dalam sumber pendapatan ataupun penerimaan yang didapat oleh pemerintah daerah maupun dalam alokasi belanja daerah yang dianggarkan oleh pemerintah daerah khususnya pada Provinsi Jawa Barat.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk penulis pribadi dan umumnya untuk pembaca sehingga dapat lebih memahami mengenai kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi ketergantungan fiskal, serta adanya deteksi ilusi fiskal.

Penelitian ini mengisi ketersediaan literatur yang belum lengkap dan menyeluruh serta hasil penelitian sebelumnya yang belum dapat memberi kepastian apakah terdapat ilusi fiskal dalam struktur APBD pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016. Hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten terkait hubungan variabel pendapatan terhadap belanja daerah untuk mendeteksi apakah terdapat ilusi fiskal dalam struktur APBD, belum mempertimbangkan aspek *fiscal decentralization*.

Faishal Rachman Firdaus, 2018

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH DALAM KERANGKA ILUSI FISKAL

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |
perpustakaan.upi.edu